

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

###### **2.1.1.1 Kebijakan**

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik bahwa “Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut apartatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik” (Suharto 2008:3)

Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dari sisi *goverment* yang lebih diperhatikan karena sebagai pengelola program pemerintahan. Hal ini karena dalam proses implementasinya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah:

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Fredrickson dan Hart, 2003:12).

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang lebih mengarah ke tujuan, adanya hambatan-hambatan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada. Masyarakat adalah sebagai sasaran utama dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, suatu pencapaian paling tinggi dalam pemerintahan yaitu suksesnya kebijakan yang di keluarkan pemerintah yang bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Marshall dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik bahwa “Kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan” ( Marshall, 2003:21).

Menurut pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara. Kebijakan seyogyanya diarahkan melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting untuk menentukan kebijakan yang akan di laksanakan dan yang sesuai dengan potensi daerahnya.

Adanya suatu kebijakan dalam meneliti kekurangan apa yang terjadi dalam suatu program pemerintah. Menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (Woll, 2003:2).

Berdasarkan pengertian kebijakan sesuai pengaruh dalam pelaksanaannya yaitu memilih kebijakan atau keputusan dari pemerintah, melihat penganggaran pada program kerja pemerintah dan melihat dampak yang akan terjadi atas adanya kebijakan tersebut, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada. Adanya dampak suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu berhasilnya suatu program yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

#### **2.1.1.2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (Sarundajang, 2002:5)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah Satu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi Legislasi yaitu Membuat Peraturan Daerah. Sesuai dengan tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan meyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala Daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. (Atmosudirjo, 1979 :15).

Berdasarkan pemaparan tersebut Pemerintahan Daerah dan DPRD dapat bekerjasama dengan serasi selaras antara Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka ada penyelenggaraan tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

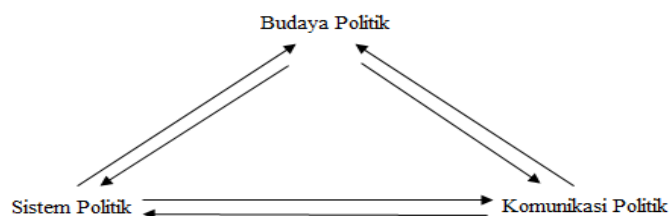
## 2.1.2 Komunikasi Politik

### 2.1.2.1 Pengertian Komunikasi Politik

Menurut Rush dan Althoff (1971:255) sebagaimana yang dikutip oleh Asep Saipul Muhtadi (2008:28), Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik – merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi. Secara sederhana unsur-unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

#### Sistem Politik dalam Komunikasi Politik



Sumber: *Rush dan Althoff (Dalam Maswadi Rauf, 1993:21)*

Menurut pendapat di atas komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis, komunikasi politik menurut pandangan di atas

memberitahukan bahwasanya komunikasi politik itu merupakan unsur yang dinamis dari suatu sistem politik.

Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Dalam kata-kata Almod sendiri:

*"All functions performed in the political system - political socialization and recruitment, articulation interests, vested interests, rule making, application of rules, and adjudication rules - are carried out by means of communication."*

Dalam buku *The Politics of The Development Areas*, pada tahun 1960. Almod berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya semua fungsi dalam pelaksanaan sistem politik, rekrutmen politik dan lain sebagainya dilakukan dengan cara berkomunikasi.

Menurut Maswadi Rauf dalam Harun dan Sumarno (2006:3-5) komunikasi politik berfungsi sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi

politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka komunikasi politik itu merupakan sebuah kegiatan politik yang memiliki ciri aktor politik yang melakukan kegiatan – kegiatan politik seperti menyampaikan pesan – pesan yang mengandung unsur politik ataupun ajakan untuk memilih kandidat. Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas pula tampak pada definisi yang diketengahkan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, *What is political communication* adalah:

“Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 2003: 158).”

Berdasarkan pemaparan Effendy mengenai komunikasi politik itu merupakan proses penyampaian sebuah pesan politik yang dilakukan dengan sengaja oleh aktor politik kepada masyarakat agar terciptanya sebuah komunikasi dalam menggiring perilaku masyarakat. Kemudian komunikasi politik menurut Dan Nimmo komunikasi politik sebagai berikut:

“Menurut Dan Nimmo (2005: 8) “komunikasi Politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi – konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. “

Menurut penuturan tersebut inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran

politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan.

Komunikator itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (dalam Dan Nimmo, 2005) digolongkan menjadi tiga yaitu politisi, profesional dan aktivis ketiganya dalam aktivitas keseharian mereka harus melakukan komunikasi politik. Nimmo (2005;30) menjelaskan secara rinci mengenai komunikator politik ini. Nimmo memaparkan bahwa terdapat tiga macam komunikator politik. Pertama, adalah komunikator politik yang mempunyai pekerjaan sebagai politisi/politikus, mereka adalah calon atau pemegang jabatan tertentu di pemerintahan. Tak peduli apakah ia ditunjuk atau pejabat karir dan tak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek utama kegiatan ini. Politisi atau politikus inilah yang sering juga disebut sebagai *elite* politik. Dalam kegiatan keseharian, para politikus harus melakukan komunikasi politik. Hal ini dilakukan, untuk mengomunikasikan pesan pesan politik kepada sesama politikus, pesan politik ini bisa berupa tuntutan, protes dan kebijakan. kemudian, melakukan komunikasi politik kepada masyarakat. Kedua; profesional sebagai komunikator politik muncul diakibatkan karena berkembangnya perangkat teknologi media massa. Ia menyuarakan pendapat komunikator politik yang sesungguhnya dan menghubungkan dengan masyarakat, menghubungkan publik umum, dengan pemimpin politik dan membantu menempatkan masalah dan peristiwa pada agenda diskusi public yang termasuk dalam profesional adalah para jurnalis (*reporter, coordinator*



berita, penerbit, pengarah berita, eksekutif stasiun dan lainnya). Profesional lainnya adalah promotor, ia adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu.

Seperti agen publisitas, tokoh masyarakat, pejabat humas, pejabat informasi publik, sekretaris presiden dan lainnya (Dan Nimmo, 2005: 35). Komunikator yang ketiga adalah aktivis, yang dimaksud dengan aktivis adalah orang-orang yang tidak bekerja untuk kepentingan politik. Namun tugasnya adalah menjadi juru bicara atau sebagai peloby. Politik bukan lapangan pekerjaannya, namun ia terlibat baik dalam kegiatan politik walaupun dalam komunikasi. Karena itulah ia disebut aktivis politik. Aktivis lainnya yang juga berfungsi sebagai komunikator politik adalah pemuka masyarakat.

“Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa ”penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*) dan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) untuk diperjuangkan menjadi *public policy* (Budiardjo, 2008: 406).”

Dari pengertian - pengertian di atas menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat *integrative*. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat fungsi - fungsi itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

Beberapa pendapat mengenai komunikasi politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan suatu penyampaian pesan politik antara pemerintah, partai politik, dan juga warga masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang dapat mempengaruhi seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang telah ditentukan bersama. Jadi, dilihat dari sistem dan komunikasi politik di atas komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh pimpinan partai politik terhadap anggota partai politik dengan saluran/media berupa lisan maupun tulisan dan diharapkan anggota partai politik tersebut mengerti dan menyetujui dari apa yang telah disampaikan.

Komunikasi politik dilakukan melalui proses yang meliputi unsur-unsur komunikasi politik yaitu (Nimmo, 2004:16):

a. Sumber

Para komunikator politik ini adalah *pols*, yakni politikus yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan *vols*, yaitu warga negara yang aktif dalam politik berdasarkan paruh waktu (*part-time*) dan sukarela (*voluntary*).

b. Pesan

Sebagian besar politik adalah pembicaraan. Untuk memahami mengatakan apa dari komunikasi politik, dan gunanya untuk mula-mula melihat bahasa yang digunakan orang dalam berbicara, yaitu gejala linguistik politik. Komunikator politik menggunakan bahasa dan simbol, baik untuk meyakinkan khalayak.

c. Saluran

Media politik sebagai sarana saluran politik dapat dibagi menjadi: saluran massa, interpersonal, dan organisasi. Pemerintah dan pers sebagai sumber dan saluran komunikasi politik. Jika perbuatan politik kita diturunkan dari makna yang kita berikan kepada objek-objek politik, maka media berita menduduki posisi yang penting dalam proses komunikasi opini karena kenyataan bahwa kita memperoleh begitu banyak informasi politik kita langsung dari siaran berita televisi dan dari surat kabar.

d. Audiens atau pendengar

Komunikasi terlibat dalam perbuatan gabungan atau transaksi antara sumber dan penerima. Khalayak komunikasi politik bukanlah wadah yang pasif yang ke dalamnya para pemimpin politik dengan berbagai karakteristik dan motif hanya menuangkan beraneka imbauan dengan menggunakan bahasa, simbol, piranti, dan media yang menarik.

e. Umpan balik

Akibat komunikasi diturunkan dari interaksi antara tiga unsur yang dapat dipisahkan: pesan, khalayak yang diduga akan dipengaruhi, dan pengaruh yang diakibatkannya. Singkatnya, akibat tidak ditentukan terpisah dari interpretasi: bahkan, akibat adalah tindakan interpretatif sinambung yang diturunkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan politik.

Menurut pemaparan di atas bahwasanya komunikasi politik memiliki beberapa unsur yang terhubung satu sama lain, misalnya dalam komunikasi politik harus ada seseorang politikus sebagai aktor utama yang menjadi sumber kemudian ada pesan yang disampaikan, tentu saja pesan tersebut berisi tentang narasi – narasi politik yang harus sesuai dengan target dari politikus tersebut lalu ada saluran, saluran ini bisa berbentuk media penyampaian pesan – pesan politik yang disampaikan bisa melalui media massa, media cetak ataupun media sosial. Dengan adanya media seorang politikus akan terbantu dalam proses penyebaran pesan – pesan politik yang disampaikan dan pesan tersebutpun akan sampai ditataran pendengar kalangan yang paling ingin disentuh oleh politikus, kemudian harus adanya audiens sebuah komunikasi politik akan berjalan apabila adanya komunikator dan komunikan, ada yang menyampaikan pesan dan ada yang mendengarkan pesan. Audiens disini sangat penting dikarenakan pesan politik yang disampaikan harus tepat sasaran agar terjadinya *feedback* atau umpan balik hal ini terjadi akibat terjadinya sebuah komunikasi serta umpan balik ini akan bereaksi apabila pesan yang disampaikan tepat atau tidaknya kepada audiens.

### 2.1.2.2 Bentuk – bentuk komunikasi politik

Menurut Arifin (2003:65), terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu:

1. Retorika, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Rhetorica*, yang artinya seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak.
2. Agitasi Politik, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Agitasi bertujuan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami.
3. Propaganda, berasal dari bahasa Latin *Propagare*, yang artinya menanamkan tunas suatu tanaman. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan yang mudah terkena sugesti.
4. *Public Relations Politics*, merupakan suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. *Public Relations Politics* bertujuan untuk menciptakan hubungan

saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).

5. Kampanye Politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
6. Lobi Politik, istilah lobi mengacu pada tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel. Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan karisma. Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.
7. Media Massa, sebagai perluasan panca indra manusia (*sense extention theory*) dan sebagai media pesan dalam hal pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Menurut pernyataan tersebut ada tujuh poin penting dalam bentuk komunikasi politik, pertama ialah retorika ini hal lumrah yang sering terjadi saat pemilihan umum, retorika sendiri yang merupakan seni dalam berbicara

akan dengan mudah menggiring para pendengar untuk menjadi satu suara dengan mereka yang ahli dalam beretorika ini akan menjadi nilai lebih seorang politikus dalam menggaet suara. Kemudian yang kedua ada agitasi politik ini bertujuan untuk dapat menggerakkan massa melalui lisan maupun tulisan yang dapat meningkatkan gairah massa, gerakan ini sering terjadi disetiap diadakannya pemilihan umum, ketiga propaganda kegiatan ini ialah untuk menyampaikan pesan politik akan tetapi pesan yang disampaikan tidaklah objektif terkesan menggiring opini yang menguntungkan satu pihak serta menjerumuskan pihak yang lainnya propaganda ini sering digunakan oleh kader partai politik untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilihan umum. Keempat *public relations politics* ini merupakan kegiatan yang memiliki sifat yang terbalik dengan propaganda, kegiatan *public realtions politics* memiliki tujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis, saling percaya, rukun, terbuka antar politikus, aktivis maupun masyarakat umum. Berikutnya yang kelima ada kampanye politik merupakan agenda komunikasi politik yang dilakukan dengan melibatkan khalayak ramai serta dapat memberikan efek tertentu pada massa yang menghadiri agenda kampanye politik tersebut dalam kurun waktu tersebut. Pada poin keenam yaitu lobi politik yang merupakan agenda komunikasi politik antara individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi organisasi lain ataupun untuk membuat kesepakatan politik yang dapat menguntungkan satu sama lain dan membangun sebuah koalisi dan yang terakhir yaitu media massa. Media massa merupakan alat untuk membantu menyebarkan agenda politik ke khalayak ramai agar dapat

memberikan pesan serta citra politik kepada massa yang lebih banyak juga tersentuh sampai *grassroots* serta salah satu alat untuk mendapatkan simpati lebih banyak.

### **2.1.2.3 Tujuan Komunikasi Politik**

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai - nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what effect*", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses

komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwasanya komunikasi politik memiliki dua orientasi yang pertama komunikasi politik bertujuan pada nilai ataupun usaha dalam menggapai tujuan tersebut, nilai - nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Kemudian yang kedua menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu dengan begitu sudah terlihat jelas bahwasanya tujuan komunikasi politik itu terlihat arah maupun orientasinya dengan jelas.

Tujuan komunikasi politik berhubungan dengan pesan politik yang akan disampaikan, yaitu: informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan *public opinion* (pendapat umum) dan menjawab pendapat atau tuduhan lawan politik. Menurut Arifin (2003:1), terdapat tujuan komunikasi politik, yaitu sebagai berikut:

#### A. Membangun Citra Politik

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.



## B. Membentuk dan Membina Pendapat Umum

Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Selain memiliki fungsi memberi informasi, media massa juga mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan.

## C. Mendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang (khalayak) mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut komunikasi politik memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk membangun citra politik, citra politik ini akan terbangun serta terbentuk dengan seiring berjalannya komunikasi politik yang dilakukan baik itu melalui penerimaan informasi secara langsung maupun melalui media massa maka citra politik akan terbangun. Berikutnya membentuk pendapat umum dalam pembentukannya pendapat umum ini sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa, selain memiliki fungsi memberi informasi, media massa juga mendidik,

menghubungkan dan menghibur maka dengan adanya media politik dapat membentuk pendapat umum. Serta berikutnya ialah komunikasi politik bertujuan untuk mendorong partisipasi politik hal ini dimaksudkan untuk mendorong minat individu maupun kelompok bergerak aktif dalam kegiatan politik sehingga terdorongnya semangat individu maupun kelompok dalam partisipasi pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

#### **2.1.2.4 Dinamika Komunikasi Politik**

Dari arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Dinamika menurut Slamet Santoso. Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. (Slamet Santoso, 2004:5). Menurut pemaparan tersebut dinamika komunikasi politik merupakan gerak masyarakat yang dilakuka secara berkala dan dapat mengakibatkan perubahan ditatanan kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut para ahli mengenai komunikasi politik ialah sebagai berikut, Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 2002: 158).

Menurut Rush dan Althoff (1997:255). Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut dinamika komunikasi politik ialah sebuah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik serta penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk membuat sebuah pergerakan yang terus-menerus sehingga dapat menimbulkan efek setelahnya.

#### **2.1.2.5 Strategi Komunikasi**

Strategi Komunikasi Menurut Uchjana (1993:300) Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) Untuk mencapai satu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut; strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan taktik operasionalnya. Jadi strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi.

Berdasarkan pemaparan itu strategi komunikasi merupakan sebuah cara mencapai tujuan, dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya sebuah perpaduan antara strategi dan komunikasi untuk mempermudah atau untuk mengatur pola strategi. Itu bisa dimulai dengan membuat perencanaan komunikasi serta manajemen komunikasi agar supaya saat penerapan strategi tersebut tersusun dengan rapih sehingga target tujuan juga tercapai.

Dalam melaksanakan strategi komunikasi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan antara lain: (Effendy,2006:32) Sumber (komunikator) Secara teoritis hasil atau akibat penyampaian pesan terhadap pihak penerima, bila sumber mempunyai:

- 1) Kredibilitas Dalam menyampaikan kebijakan penyiaran, kompetensi dari narasumber terutama saat acara formal seperti seminar atau membina masyarakat sangat diperhatikan. Pejabat tertentu yang terkait penyiaran maupun *opinin leader* dan akademisi sebagai penentu kredibilitas suatu komunikator.
- 2) Daya tarik Narasumber yang kredibel juga dituntut menarik dalam mengemas penyajian materinya sehingga pesan yang dikomunikasikan dapat dengan mudah sampai kepada publik. Setiap strategi yang dilakukan memiliki tujuan masing-masing.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya kredibilitas dari seorang politikus sangatlah penting karena itu akan memberikan efek yang baik jika harus terjun ke msyarakat serta memiliki daya tarik yang lebih. Pada istilah

lain strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara langsung, secara lisan maupun tidak langsung melalui media tertentu Effendy (2008:5). Menurut pernyataan tersebut strategi komunikasi dimaksudkan untuk proses penyampaian pesan agar mendapatkan simpati atau empati dari calon pemilih.

### **2.1.3 Partai Politik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Partai Politik**

Menurut Miriam Budiarjo (2008:16) Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Berdasarkan pandangan tersebut partai politik merupakan sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama diantar anggotanya sehingga mereka memiliki sebuah orientasi yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik serta kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Roy C. Macridis (2008:7) mengatakan bahwasanya partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Berdasarkan pernyataan tersebut partai politik merupakan sebuah asosiasi yang memobilisasi rakyat serta mewakili kepentingan tertentu sehingga dari hasil tersebut mereka memunculkan kepemimpinan politik yang akan digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik memberikan pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan penuturan tersebut maka konteks tujuan dari partai politik adalah mewujudkan tujuan negara maka pembentukan partai politik didasarkan bersifat nasional. Jika dibentuk dengan kedaerahan maka tujuan bernegara sulit terwujud dan terbentuknya partai politik dalam skala nasional untuk menjaga persatuan bangsa, dibentuk dengan sekelompok orang agar partai politik merupakan representasi dari kesamaan kehendak dan cita-cita, bukan cita-cita dan kehendak individu. Sehingga pembentukan partai politik adalah kehendak kolektif bukan kehendak individu. Partai politik merupakan hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin dalam UUD. Pembentukan partai politik didasarkan atas hak hak masyarakat dan digunakan sebagai sarana politik masyarakat. Namun tujuan dari partai politik tetap untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.

### 2.1.3.2 Tujuan Partai Politik

Heryanto (1984:123) partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengagregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara tujuan partai politik:

- a. Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (*output* pada umumnya)
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada dipihaknya)
- c. Berperan sebagai pemadu (*Streamlining*), dalam hal ini partai politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Berdasarkan pernyataan berikut maka partai politik memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan memberikan orang – orang terbaiknya untuk duduk diparlementer. Tujuan Partai Politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai Politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.

### **2.1.3.3 Fungsi Partai Politik**

Menurut Miriam Budiarjo (2004:17) di dalam negara demokrasi, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik dapat mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diletakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.
2. Partai Politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada



masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform, dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

3. Partai Politik berfungsi sebagai saran rekrutmen politik Partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik maka akan muncul ditaktorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.
4. Partai Politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada masyarakat yang heterogensifatnya, perbedaan pendapat baik yang berdasarkan etnis, status sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian yang ada dapat diatasi dengan bantuan partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat - akibat negatifnya seminimal mungkin.

Berdasarkan pernyataan tersebut partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik yang artinya partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai

sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Kemudian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Partai politik juga merupakan sarana rekrutmen politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik.

Adapun dicatatkan oleh Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 pasal 11 tentang fungsi partai politik:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik maka sudah jelas bahwasanya partai politik yang salah satunya ialah Partai Keadilan Sejahtera memiliki fungsi sebagai pendidik bagi masyarakat agar warga negara paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian partai politik juga berfungsi sebagai pengatur konflik maka partai politik memiliki peran cukup besar dalam mengatur iklim politik yang ada.

## **2.1.4 Pemilihan Umum**

### **2.1.4.1 Pengertian Pemilihan Umum**

Paimin napitupulu (2004: 65) mendefinisikan pemilu sebagai suatu mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin pemerintah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena "*political market*" yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak social dengan para peserta pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan

kepada orang atau partai yang dipercayai. Berdasarkan pernyataan tersebut pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*). Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara, menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk merepresentasikan suara rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab, pemilu juga digunakan sebagai parameter penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka pemilu bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif

kebijakan umum, sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi serta sebagai sarana memobilisasi menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan.

#### **2.1.4.2 Pemilihan Umum Legislatif**

Semangat demokrasi dalam pemilu legislatif 2019 tampak dalam asas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 1) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- 3) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun.

5) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut pemilihan umum legislatif memiliki asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun dalam melaksanakan haknya

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan hasil peninjauan, maka peneliti dapat menguraikan tentang komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum legislatif

tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu faktor yang memberikan gambaran tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Adapun faktor yang dapat memberikan perolehan kursi pada pemilihan legislatif Partai Keadilan Sejahtera ini berupa, retrorika, agitasi politik, jika faktor tersebut tidak dapat mempengaruhi pemilih maka hasil yang akan dicapai jauh dari tujuan awal kemudian hasil pemilihan umum legislatif akan tidak sesuai dengan target awal. Komunikasi politik ini sangatlah diharapkan sukses besar, karena dengan menggunakan komunikasi politik yang tepat akan dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada hasil perolehan kursi saat pemilihan umum legislatif periode 2014 – 2019.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan teori dari Anwar Arifin (2003:65). Dalam buku Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik yang meliputi retrorika, agitasi politik, propaganda, *public relations politics*, lobi politik, kampanye politik, dan media massa. Bentuk – bentuk komunikasi politik sangatlah penting untuk dipenuhi demi keberhasilan komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam meraih suara yang banyak untuk dapat mendominasi hasil pemilihan umum legislatif, tujuh bentuk komunikasi tersebut merupakan aspek yang saling keterkaitan dan berkesinambungan serta dapat mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan, tujuh bentuk komunikasi tersebut juga dapat menentukan keberhasilan komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera. Dengan komunikasi politik maka dapat dipahami bahwa bentuk – bentuk komunikasi politik tersebut saling keterkaitan dan berkesinambungan untuk

tercapainya hasil yang maksimal pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Purwakarta.

**Pertama** adalah aspek retorika dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan bagian penting dalam penggunaan strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena retorikan ialah seni dalam berbicara sehingga jika kader Partai Keadilan Sejahtera memiliki seni dalam berbicara maka akan sangat diberikan kemudahan dalam upaya menggaet pemilih agar mau memberikan suaranya.

**Kedua** adalah aspek agitasi politik dalam komunikasi politik. Hal ini untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan, terutama gerakan politik. Agitasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dengan menggunakan agitasi maka dapat melakukan pergerakan secara masif dari pendukung sehingga mampu mendongkrak elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif.

**Ketiga** adalah propaganda dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan sebuah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat sekelompok orang. Propaganda ialah sebuah cara untuk memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Strategi komunikasi politik menggunakan unsur propaganda juga merupakan cara untuk meningkatkan loyalitas pendukung setia Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum legislatif.



**Keempat** adalah *public relations politics* dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan suatu upaya alternatif dalam penyampaian pesan politik yang akan disampaikan. *Public Relations Politics* bertujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, kader dengan masyarakat agar dapat memberikan dukungan suara pada Partai Keadilan Sejahtera.

**Kelima** adalah lobi politik dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan upaya alternatif dalam mencari dorongan dukungan bisa dengan melobi para petinggi partai lainnya yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan koalisi dan penguatan dari dalam sehingga dapat meningkatkan daya jual partai kepada masyarakat banyak dengan melobi partai politik yang seiya sekata dalam perjuangan memenangkan kontestasi politik

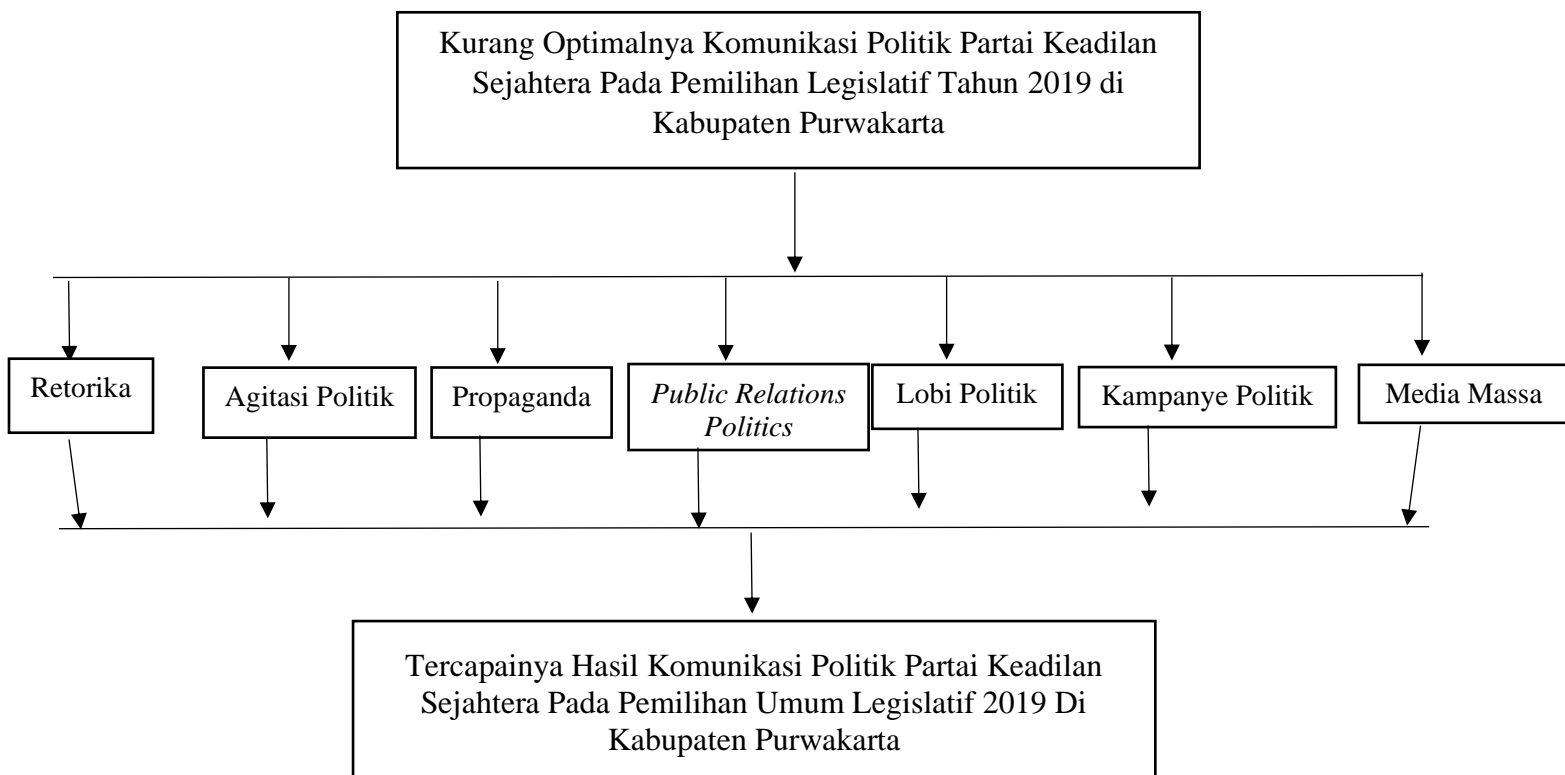
**Keenam** adalah kampanye politik dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan kegiatan yang lumrah biasa dilakukan setiap partai politik akan tetapi dalam pengemasannya terkadang perlu bumbu – bumbu yang menarik agar supaya mendatangkan massa yang banyak sehingga dapat mendapatkan atensi dari masyarakat. Kampanye politik merupakan cara yang lumayan ampuh dalam menarik perhatian masyarakat karena dalam pelaksanaannya sering kali terjadi hal – hal yang unik sehingga memunculkan ketertarikan dari masyarakat untuk mengikuti acara yang dapat mendatangkan massa yang banyak.

**Ketujuh** adalah media massa dalam komunikasi politik. Hal ini merupakan bagian yang cukup vital, karena penyampaian pesan politik di era saat ini akan sangat efektif apabila dilakukan melalui media massa tentu saja itu dapat lebih

banyak menjangkau massa yang lebih luas, bahkan tidak perlu turun ke lapangan untuk menyampaikan pesan politik, cukup duduk buat pesan kemudian sampaikan sehingga masyarakat baik dari kalangan atas sampai bawah mengetahui pesan politik yang disampaikan sehingga dapat menimbulkan rasa ingin memberikan suara pada pemilihan umum kepada partai tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini model kerangka penelitian:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



### **2.3 Proposisi**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka proposisi pada skripsi ini adalah komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta ditentukan oleh retorika, agitasi politik, propaganda, *public relations politics*, lobi politik, kampanye politik, dan media massa.